



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI JUMAT, 31 JULI 2026

RINGKASAN BERITA HARI INI



Komitmen Tekan Stunting, Bupati-Ketua TP-PKK Sidoarjo Raih Penghargaan

Sidoarjo - **HARIAN BANGSA**
Bupati Sidoarjo Subandi dan Ketua TP-PKK Sidoarjo Satriatun Subandi menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Penghargaan itu diberikan atas komitmen dalam mempercepat penurunan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Shodiqin, kepada Subandi dan Satriatun. Penyerahan dilakukan dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Berbagai inovasi program unggulan yang dijalankan Pemkab Sidoarjo sejalan dengan upaya menyiapkan Generasi Emas 2045. Sejumlah program prioritas nasional juga telah dijalankan di Sidoarjo, mulai dari Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya),



Bupati Sidoarjo Subandi dan Ketua TP-PKK Sidoarjo Satriatun Subandi saat menerima penghargaan.

Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), Lansia Berdaya (Sidaya), Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Subandi mengatakan upaya mewujudkan

keluarga berkualitas membutuhkan keterlibatan aktif kedua orang tua dalam pengasuhan. Oleh karena itu, Pemkab Sidoarjo mendorong keterlibatan ayah melalui sejumlah gerakan. "Gerakan ini bertujuan menguatkan peran serta ayah dalam pengasuhan sekaligus memperkuat ikatan emosional anak dalam men-

dampingi proses pendidikannya," ujar Subandi, Kamis (30/7/2026).

Gerakan tersebut diwujudkan melalui penerbitan surat edaran Gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (Gamas).

Selain memperkuat peran orang tua, Pemkab Sidoarjo juga berupaya menekan stunting melalui penguatan posyandu dan perbaikan sanitasi lingkungan. Upaya tersebut turut didukung dengan capaian Sidoarjo yang dinyatakan memenuhi status Kabupaten Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar oleh tim verifikasi Provinsi Jatim. "Pelaksanaan STBM tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana sanitasi, tetapi lebih menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan," tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo Heni Kristiani menjelaskan implementasi program-program tersebut di tingkat daerah. (md/irus)

Komisi D DPRD Desak Dinsos Perbaiki Data DTSEN



Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso

KOTA-Masih ditemu-

gori desil 2, 3, atau 4, tetapi justru tercatat berada di desil 6 ke atas.

"Ada masyarakat Sidoarjo yang seharusnya itu ada di desil 3, desil 4, bahkan ada yang di desil 2, tapi ternyata di data DTSEN itu desilnya 6 ke atas. Ada desil 6, desil 7, desil 8. Artinya ini sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetapi akhirnya tidak berhak menerimanya karena status desilnya di atas 5," ujar Bangun, Rabu (29/7).

AMPHIBI Tawarkan Mesin Extruder ke Pemkab, Residu Sampah Diolah Jadi Bahan Bakar Industri

KOTA-Upaya mempercepat penanganan persoalan sampah di Kabupaten Sidoarjo mendapat tawaran solusi baru. Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B.3 Indonesia (AMPHIBI) Jawa Timur menawarkan penerapan teknologi mesin extruder yang mampu mengolah residu sampah menjadi pelet bahan bakar industri.

Teknologi tersebut diyakini dapat memangkas secara signifikan volume sampah yang selama ini berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon.

Tawaran tersebut disampaikan dalam audiensi antara AMPHIBI Jatim dan



SOLUSI: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama AMPHIBI Jatim membahas penanganan persoalan sampah di Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Selain menghadirkan teknologi,

organisasi pemerhati lingkungan itu juga siap mendampingi sekaligus melatih

petugas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TP-ST) agar mesin dapat diope-

rasikan secara optimal.

Ketua AMPHIBI Jawa Timur Samsul Hadi mengatakan, sistem yang ditawarkan mengedepankan proses pemilahan sampah sejak awal.

Setelah dipilah, hanya sampah residu yang diproses menggunakan mesin extruder hingga menjadi pelet yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri.

"Melalui sistem tersebut, sampah dipilah lebih dahulu dan hanya residu yang diolah menjadi pelet sebagai bahan bakar industri. Hasil akhirnya bukan lagi sampah, tetapi produk yang memiliki nilai ekonomis," ujarnya. (dik/vga)

senior Partai Nasional (PAN) askan, DT-upakan pe-in dari Data sejahteraan (S).

annya bersumber utalata Kemeny-l yang dihimplesa melalui il, kemudian dengan hasil nomi Badan tik (BPS), lah menjadi gal nasional nakan selu-terian, lema-ga pemerin-h, Bangun plementasi-angan masih epenuhnya ik/vga)

Bupati Tegaskan Komitmen Berantas Penyakit Masyarakat

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk memberantas maraknya penyakit masyarakat. Khususnya peredaran minuman keras ilegal dan tingginya kasus pergaulan bebas.

Komitmen itu kembali ditegaskan Bupati Sidoarjo Subandi saat menggelar silaturahmi dan dialog bersama jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo di Kantor PCNU Sidoarjo, Rabu (29/7).

Di hadapan para pengurus PCNU Sidoarjo, Subandi menyampaikan langkah tegas akan diambil untuk mengatasi persoalan banyaknya peredaran miras, termasuk menindak dan menutup usaha yang

menjual minuman keras tanpa izin di wilayah Sidoarjo.

Pertemuan itu juga dihadiri Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Sidoarjo KH Nur Khois Mubtaha, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khozim KH Abussalam, Ketua DPC PKB Sidoarjo Reza Ali Faizin, serta Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdullah Nasih.

Bupati menyatakan bahwa penanganan penyakit masyarakat memerlukan sinergi yang



Bupati menghadi silaturahmi dan dialog bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Kantor PCNU Sidoarjo.

kuat antara ulama dan peme-rintah daerah (umara). Pemkab

Sidoarjo berencana mengencangkan pengawasan hingga ke tingkat desa dan kecamatan untuk menyoroti tempat-tempat yang diindikasikan melanggar aturan.

"Pemerintah akan mengambil tindakan tegas berupa penutupan operasional terhadap tempat usaha minuman keras berskala besar maupun warung kopi dan kafe ilegal. Bersama jajaran kecamatan dan kepala desa, kami akan langsung turun melakukan inspeksi mendadak serta evaluasi berkala agar peredaran miras tidak berulang," tegas Subandi.

la menambahkan, kolaborasi dengan para ulama murti dilakukan demi menjaga ke-

tenteraman dan masa depan generasi muda di Sidoarjo, lepas dari kepentingan politik praktis. Langkah tegas Pemkab Sidoarjo ini merespons kekhawatiran mendalam dari tokoh masyarakat dan ulama terkait melonjaknya kasus penyakit sosial yang kian mengancam kelompok remaja dan pelajar.

Pergaulan bebas yang dipicu maraknya peredaran miras dan penyalahgunaan teknologi media sosial dinilai memicu lonjakan kasus HIV/AIDS di Sidoarjo. Sejumlah ancaman tersebut, menurut Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin, menjadi sinyal darurat yang dapat merusak moral serta kesehatan generasi penerus

jika tidak ditangani dengan aksi nyata.

"Peredaran minuman keras dan pergaulan bebas telah menyebabkan peningkatan kasus HIV/AIDS yang signifikan. Situasi ini memerlukan tindakan tegas dan kewaspadaan bersama. Kami mendorong Pemkab Sidoarjo tidak hanya berhenti pada rapat evaluasi, tetapi langsung mengimplementasikan penertiban regulatif dan razia rutin di lapangan," ujar Zainal.

Melalui sinergi ini, Pemkab Sidoarjo bersama PCNU berkomitmen untuk mengawal pembentukan lingkungan sosial yang lebih kondusif, aman, dan bersih dari penyakit masyarakat secara berkelanjutan. (ker/jok/tdn)

Komitmen Tekan Stunting, Bupati-Ketua TP-PKK Sidoarjo Raih Penghargaan

Sidoarjo – **HARIAN BANGSA**
Bupati Sidoarjo Subandi dan Ketua TP-PKK Sidoarjo Sriatun Subandi menerima penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Penghargaan itu diberikan atas komitmen dalam mempercepat penurunan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Shodiqin, kepada Subandi dan Sriatun. Penyerahan dilakukan dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Berbagai inovasi program unggulan yang dijalankan Pemkab Sidoarjo sejalan dengan upaya menyiapkan Generasi Emas 2045. Sejumlah program prioritas nasional juga telah dijalankan di Sidoarjo, mulai dari Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya),



Bupati Sidoarjo Subandi dan Ketua TP-PKK Sidoarjo Sriatun Subandi saat menerima penghargaan.

Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), Lansia Berdaya (Sidaya), Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sasaran 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Subandi mengatakan upaya mewujudkan

keluarga berkualitas membutuhkan keterlibatan aktif kedua orang tua dalam pengasuhan. Oleh karena itu, Pemkab Sidoarjo mendorong keterlibatan ayah melalui sejumlah gerakan. "Gerakan ini bertujuan menguatkan peran serta ayah dalam pengasuhan sekaligus memperkuat ikatan emosional anak dalam men-

dampingi proses pendidikannya," ujar Subandi, Kamis (30/7/2026).

Gerakan tersebut diwujudkan melalui penerbitan surat edaran Gerakan Ayah Mengambil Rapor dan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (Gamas).

Selain memperkuat peran orang tua, Pemkab Sidoarjo juga berupaya menekan stunting melalui penguatan posyandu dan perbaikan sanitasi lingkungan. Upaya tersebut turut didukung dengan capaian Sidoarjo yang dinyatakan memenuhi status Kabupaten Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar oleh tim verifikator Provinsi Jatim. "Pelaksanaan STBM tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana sanitasi, tetapi lebih menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan," tuturnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo Heni Kristiani menjelaskan implementasi program-program tersebut di tingkat daerah. (md/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Tegaskan Komitmen Berantas Penyakit Masyarakat

Sidoarjo, Memorandum

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk memberantas maraknya penyakit masyarakat. Khususnya peredaran minuman keras ilegal dan tingginya kasus pergaulan bebas.

Komitmen itu kembali ditegaskan Bupati Sidoarjo Subandi saat menggelar silaturahmi dan dialog bersama jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo di Kantor PCNU Sidoarjo, Rabu (29/7).

Di hadapan para pengurus PCNU Sidoarjo, Subandi menyampaikan langkah tegas akan diambil untuk mengatasi persoalan banyaknya peredaran miras, termasuk menindak dan menutup tempat usaha yang

menjual minuman keras tanpa izin di wilayah Sidoarjo.

Pertemuan itu juga dihadiri Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Sidoarjo KH Nur Kholis Misbah, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoziny KH Abussalam, Ketua DPC PKB Sidoarjo Reza Ali Faizin, serta Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasik.

Bupati menyatakan bahwa penanganan penyakit masyarakat memerlukan sinergi yang



Bupati memghadiri silaturahmi dan dialog bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Kantor PCNU Sidoarjo.

kuat antara ulama dan pemerintah daerah (umara). Pemkab

Sidoarjo berencana mengencangkan pengawasan hingga ke tingkat desa dan kecamatan untuk menyisir tempat-tempat yang diindikasikan melanggar aturan.

"Pemerintah akan mengambil tindakan tegas berupa penutupan operasional terhadap tempat usaha minuman keras berskala besar maupun warung kopi dan kafe ilegal. Bersama jajaran kecamatan dan kepala desa, kami akan langsung turun melakukan inspeksi mendadak serta evaluasi berkala agar peredaran miras tidak berbandang," tegas Subandi.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan para ulama murni dilakukan demi menjaga ke-

tenteraman dan masa depan generasi muda di Sidoarjo, lepas dari kepentingan politik praktis. Langkah tegas Pemkab Sidoarjo ini merespons kekhawatiran mendalam dari tokoh masyarakat dan ulama terkait melonjaknya kasus penyakit sosial yang kian mengancam kelompok remaja dan pelajar.

Pergaulan bebas yang dipicu maraknya peredaran miras dan penyalahgunaan teknologi media sosial dinilai memicu lonjakan kasus HIV/AIDS di Sidoarjo. Sejumlah ancaman tersebut, menurut Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin, menjadi sinyal darurat yang dapat merusak moral serta kesehatan generasi penerus

jika tidak ditangani dengan aksi nyata.

"Peredaran minuman keras dan pergaulan bebas telah menyebabkan peningkatan kasus HIV/AIDS yang signifikan. Situasi ini memerlukan tindakan tegas dan kewaspadaan bersama. Kami mendorong Pemkab Sidoarjo tidak hanya berhenti pada rapat evaluasi, tetapi langsung mengimplementasikan penertiban regulatif dan razia rutin di lapangan," ujar Zainal.

Melalui sinergi ini, Pemkab Sidoarjo bersama PCNU berkomitmen untuk mengawal pembentukan lingkungan sosial yang lebih kondusif, aman, dan bersih dari penyakit masyarakat secara berkelanjutan. (kri/jok/ldn)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

AMPHIBI Tawarkan Mesin Extruder ke Pemkab, Residu Sampah Diolah Jadi Bahan Bakar Industri

KOTA-Upaya mempercepat penanganan persoalan sampah di Kabupaten Sidoarjo mendapat tawaran solusi baru. Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B.3 Indonesia (AMPHIBI) Jawa Timur menawarkan penerapan teknologi mesin extruder yang mampu mengolah residu sampah menjadi pelet bahan bakar industri.

Teknologi tersebut diyakini dapat memangkas secara signifikan volume sampah yang selama ini berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jabon.

Tawaran tersebut disampaikan dalam audiensi antara AMPHIBI Jatim dan



SOLUSI: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama AMPHIBI Jatim membahas penanganan persoalan sampah di Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Selain menghadirkan teknologi,

organisasi pemerhati lingkungan itu juga siap mendampingi sekaligus melatih

petugas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TP-ST) agar mesin dapat diope-

rasikan secara optimal.

Ketua AMPHIBI Jawa Timur Samsul Hadi mengatakan, sistem yang ditawarkan mengedepankan proses pemilahan sampah sejak awal.

Setelah dipilah, hanya sampah residu yang diproses menggunakan mesin extruder hingga menjadi pelet yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri.

"Melalui sistem tersebut, sampah dipilah lebih dahulu dan hanya residu yang diolah menjadi pelet sebagai bahan bakar industri. Hasil akhirnya bukan lagi sampah, tetapi produk yang memiliki nilai ekonomis," ujarnya. (dik/vga)

Komisi D DPRD Desak Dinsos Perbaiki Data DTSEN



Anggota Komisi D DPRD
Sidoarjo Bangun Winarso

KOTA-Masih ditemukannya warga miskin di Kabupaten Sidoarjo yang justru tercatat dalam kelompok desil 6 hingga desil 8 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Sidoarjo. Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat karena berpotensi membuat mereka kehilangan hak menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, persoalan akurasi data DTSEN masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Menurutnya, masih banyak warga yang seharusnya masuk kate-

gori desil 2, 3, atau 4, tetapi justru tercatat berada di desil 6 ke atas.

"Ada masyarakat Sidoarjo yang seharusnya itu ada di desil 3, desil 4, bahkan ada yang di desil 2, tapi ternyata di data DTSEN itu desilnya 6 ke atas. Ada desil 6, desil 7, desil 8. Artinya ini sangat merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetapi akhirnya tidak berhak menerima karena status desilnya di atas 5," ujar Bangun, Rabu (29/7).

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, DTSEN merupakan pengembangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penyusunannya berasal dari dua sumber utama, yakni data Kementerian Sosial yang dihimpun dari desa melalui Dinas Sosial, kemudian dipadankan dengan hasil sensus ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS).

Meski telah menjadi data tunggal nasional yang digunakan seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, Bangun menilai implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya akurat. (dik/vga)

PC NU Sidoarjo Desak Bupati Berantas Miras

Sidoarjo, Bhirawa

Ketua PC NU Sidoarjo Zainal Abidin mengatakan pihaknya telah silaturahmi dengan Bupati Sidoarjo Subandi, hasilnya minta kepada Pemkab Sidoarjo serius dalam memberantas peredaran MIRAS dan pergaulan bebas.

Kedua topik itu dibahas, karena dievaluasi sebagai salah satu penyebab peningkatan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo selama ini.

"Kami mendorong Pemkab Sidoarjo tidak hanya berhenti pada rapat evaluasi saja, tetapi hendaknya benar-benar melakukan penertiban secara berkala," ujar Zainal, usai mengadakan silaturahmi, Rabu (29/7) kemarin.

Pertemuan di kantor PC NU Sidoarjo itu, juga dihadiri Ketua Dewan Syuro DPC PKB Sidoarjo KH Nur Kholis Misbah, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoziny KH Abussalam, Ketua DPC PKB Sidoarjo Reza Ali Faizin, serta Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih.

Bahaya yang terjadi, akibat peredaran MIRAS dan pergaulan bebas ini, kata KH Zainal Abidin, akan

dapat merusak moral serta kesehatan generasi penerus jika tidak ditangani dengan aksi nyata dan segera.

"Kondisi ini memerlukan tindakan tegas dan kewaspadaan bersama sama," kata mantan KPUD Sidoarjo.

PC NU Sidoarjo, menurut Zainal Abidin, akan berkomitmen mengawal secara berlanjut, pembentukan lingkungan sosial yang lebih kondusif, aman, dan bersih dari penyakit masyarakat akibat pengaruh Miras dan pergaulan bebas.

Bupati Sidoarjo Subandi dengan tegas akan mematuhi apa yang diamanatkan oleh PC NU Sidoarjo tersebut. Pemkab Sidoarjo, kata Subandi, akan komitmen.

"Kami tidak akan cuma memberantas MIRAS, tetapi juga akan menindak dan menutup tempat usaha yang terbukti melanggar," ujarnya.

Tempat-tempat usaha yang melanggar, apakah itu skala besar atau sekelas warung kopi, akan ditindak tegas. Bersama jajaran kecamatan dan kepala desa, secara berkala akan langsung turun melakukan Sidak agar peredaran. [kus.kt]



Bupati Sidoarjo diundang oleh PC NU Sidoarjo membahas peredaran MIRAS dan pergaulan bebas di wilayah Sidoarjo.

alikus/bhirawa



Sosialisasi RDTR WP Tulangan yang digelar Dinas P2CKTR Sidoarjo, Kamis (30/7).
foto: Mustain/Harian BANGSA

Dinas P2CKTR Sidoarjo Rangkul Kades Sosialisasikan RDTR Tulangan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Dinas Perumahan Perumahan Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo menggelar sosialisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Tulangan Tahun 2025-2045, di Hotel Luminor Sidoarjo, Kamis (30/7).

Sosialisasi tersebut men-
yasar para Kepala Desa (Kades) se- Kecamatan Tulangan. So-
sialisasi juga dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Asisten III Setda Sidoarjo Bahrul Amig serta Camat Tulangan Moch Andi Sulistiono.

Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo

M. Bachruni Aryawan menya-
takan, sosialisasi RDTR WP Tu-
langan ini menyasar para kades
se-Kecamatan Tulangan. Harapan-
nya para kades bisa ikut sosialisasi
ke warga desanya masing-masing.

“Sehingga dalam pemanfaatan
ruang, tidak terjadi kesalahan
atau indikasi hukum. Intinya agar
pemanfaatan ruang bisa sesuai
peruntukan,” cetus Bachruni.

Ia menjelaskan, adanya
RDTR WP Tulangan juga untuk
penataan dan integrasi zona
perumahan, perdagangan,
jasa, perkantoran, dan industri
di Wilayah Tulangan.

Selain itu, kata Bachruni, di-

harapkan masyarakat Tulangan
yang ingin membuka usaha,
bisa semakin terbantu untuk
mengintegrasikan dengan OSS
(Online Single Submission) yak-
ni sistem perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
yang dikelola oleh pemerintah
Indonesia untuk mempermudah
pembuatan legalitas bisnis.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah
Nasih mengapresiasi sosial-
isasi RDTR WP Tulangan yang
digelar Dinas P2CKTR Sidoar-
jo. Sebab melalui RDTR, bisa
melakukan penataan pemban-
gunan secara mudah dan pen-
gendalian tata ruang. (sta/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kwangsan Menjadi Percontohan Desa Antikorupsi

Sidoarjo, Memorandum
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hal tersebut, ditunjukkan dengan mendorong Desa Kwangsan Kecamatan Sedati menjadi percontohan Desa Antikorupsi tingkat Nasional melalui kegiatan Monitoring Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPKRI) di Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Rabu (29/7).

Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Camat Sedati, Kepala Desa Kwangsan beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat.
Mimik Idayana menyampaikan apresiasi kepada tim penilai dari KPK RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan monitoring terhadap Desa Kwangsan sebagai calon percontohan Desa Anti Korupsi. Ia menegaskan bahwa program Desa Antikorupsi bukan sekadar proses penilaian administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk membangun budaya antikorupsi mulai dari level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
"Program Desa Antikorupsi

bukan semata-mata sebuah kompetisi, tetapi merupakan upaya strategis KPK dalam membangun budaya antikorupsi sejak dari pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat," ujar Mimik.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan, pendampingan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparat desa agar mampu menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bebas praktik korupsi.
Hj. Mimik Idayana berharap proses monitoring tersebut menjadi momentum evaluasi bagi Desa Kwangsan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Sidoarjo.

"Kami berharap Desa Kwangsan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain. Seluruh perangkat desa harus terus menjaga keterbukaan informasi publik, pengelolaan keuangan yang akuntabel, pelayanan publik yang prima, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa," katanya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan desa. Menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
"Mari kita jadikan program Desa Anti Korupsi sebagai gerakan bersama dalam membangun desa yang bersih, maju, mandiri, dan berintegritas demi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang semakin baik," pungkasnya.

Tim Penilai Provinsi Jawa Timur yang diwakili Agung Subali menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan tahapan lanjutan setelah proses penilaian di tingkat Provinsi Jawa Timur. Hasil penilaian tersebut kemudian dimonitoring secara langsung oleh Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI sebagai bagian dari proses verifikasi.
"Sesi monitoring dan diskusi menjadi tahapan penting untuk memperkuat hasil penilaian sekaligus memastikan implementasi indikator Desa Anti Korupsi berjalan secara optimal. Kedepan, Desa Kwangsan diharapkan mampu mewakili Provinsi Jawa Timur pada penilaian Desa Antikorupsi tingkat nasional dan nantinya keberhasilan Desa Kwangsan dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain di Kabupaten



Monitoring KPK di Kwangsan, Sedati.

Sidoarjo untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," tuturnya.
Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI Andhika Widiarto menegaskan bahwa program Desa Antikorupsi bukanlah ajang perlombaan untuk menentukan pemenang maupun yang kalah. Ia menjelaskan, program tersebut lahir dari keprihatinan KPK terhadap meningkatnya alokasi

dana desa yang diiringi tingginya jumlah kepala desa maupun perangkat desa yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.
Menurut Andhika, penghargaan sesungguhnya dari predikat Desa Antikorupsi bukan berupa hadiah ataupun piala, melainkan terciptanya sistem pemerintahan desa yang mampu memberikan perlindungan hukum melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. (kri/jok/ldn)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Sambut HUT RI, SIM Keliling Buka 24 Jam Selama 17 Hari

SIDOARJO – Warga Kota Delta tak perlu terburu-buru mengambil cuti atau meninggalkan pekerjaan demi memperpanjang surat izin mengemudi (SIM). Menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-81, Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan layanan SIM Keliling 24 jam nonstop selama 17 hari. Layanan dibuka sejak Rabu (29/7).

Wakapolresta Sidoarjo AKBP Mohammad Zainur Rofik mengatakan, pada pekan pertama layanan ditempatkan di Pos Polisi Taman Pinang Indah. Setelah itu, layanan akan berpindah ke Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar mulai



ANGGER BONDAN/JAWA POS

PELAYANAN KHUSUS: Anggota Satlantas Polresta Sidoarjo Aipda Graitra (kanan) melayani pemohon SIM di Taman Pinang kemarin (30/7).

Rabu (5/8) malam hingga Senin (10/8) sore. Selanjutnya, mobil SIM Keliling akan beroperasi di kawasan Ciplaz Ramayana Sidoarjo hingga Sabtu (15/8).

"Selain melayani perpanjangan SIM, masyarakat juga dapat berkonsultasi maupun

menyampaikan pengaduan hukum kepada personel Satreskrim," kata Rofik. Menurutnya, layanan 24 jam ini merupakan pengembangan dari program SIM malam yang diluncurkan sekitar sebulan lalu. (eza/hen)

Jawa Pos

Pemkab Kucurkan Hibah Rp 18,9 M untuk PCNU

Bangun Kampus dan Masjid

KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan pendidikan dan syiar keagamaan. Pada Tahun Anggaran (TA) 2026, Pemkab mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 18,9 miliar kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo yang diprioritaskan untuk pembangunan kampus Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) dan Masjid KH Muhammad Hasyim Asy'ari.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo Subandi usai menghadiri silaturahmi bersama jajaran PCNU dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Ke-



HIBAH: Bupati Sidoarjo Subandi saat silaturahmi ke kantor PCNU Sidoarjo, Rabu (29/7).

bangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo di Kantor PCNU Sidoarjo, Rabu (29/7).

Subandi menegaskan,

hibah tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan umat dan dikelola secara transparan serta akuntabel.

"Target kita hibah senilai Rp 18,9 miliar. Nanti kita fokuskan hibah ini untuk pembangunan Masjid KH Hasyim Asy'ari

dan kampus UNUSIDA. Ini harapan kita sebagai kader NU, semoga pembangunannya bisa segera terwujud dan diselesaikan," ujar Subandi.

Ia menjelaskan, pencairan hibah akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme penganggaran daerah. Bahkan, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan rencana penambahan hibah sebesar Rp 21 miliar pada tahap berikutnya apabila kondisi keuangan daerah tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai aturan, Inspektorat Daerah akan diterjunkan sebagai tim pendamping selama proses penyaluran dan pelaksanaan hibah. "Kita menunjuk Inspektorat agar ada pendampingan sehingga penyaluran hibah ini tepat sasaran dan akuntabel," tegasnya. (dik/vga)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

Trotoar Bolong di Depan Kantor Kecamatan Sidoarjo Bahayakan Pejalan Kaki

TIDAK AMAN:
Jalur pedestrian
di depan Kantor
Kecamatan Sidoarjo
rusak tertimpa
batang pohon.

SIDOARJO - Rasa aman pejalan kaki di trotoar Jalan Pahlawan, terusik. Tutup gorong-gorong yang berada di jalur pedestrian depan Kantor Kecamatan Sidoarjo jebol setelah tertimpa batang pohon saat proses pengeprasan, sehingga menyisakan lubang yang berpotensi membahayakan warga yang melintas.

Kini, lubang tersebut hanya diberi penanda sederhana berupa ranting pohon. Bagi pejalan kaki, tanda

itu dinilai belum cukup untuk mencegah risiko kecelakaan, terutama pada malam hari atau saat kondisi trotoar ramai.

Camat Sidoarjo Aziz Muslim menjelaskan tutup gorong-gorong pecah saat proses pemangkasan pohon pada Selasa (28/7). Batang pohon yang dipotong jatuh dan menghantam penutup gorong-gorong hingga rusak. Menurutnya, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan dinas terkait agar kerusakan

tersebut segera ditangani.

"Jangan sampai fasilitas publik yang rusak dibiarkan terlalu lama. Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi yang utama," katanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Muhammad Makhmud memastikan perbaikan akan segera dilakukan. DPUBMSDA juga akan menjadikan insiden tersebut bahan evaluasi. (ful/hen)

CS
Dibuat dengan CamScanner

Jawa Pos



Panen melon hidroponik di Sidoarjo.

Lahan Sempit Hasilkan 1,5 Ton Melon Hidroponik Premium

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Lahan terbatas di kawasan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) Juanda, Sidoarjo, disulap menjadi kawasan pertanian modern berbasis hidroponik. Sekitar 1,5 ton melon premium bisa dipanen dari lahan seluas 400 meter persegi.

Panen raya tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Puspenerbal, Laksamana Muda TNI Bayu Alisyahbana, serta dihadiri sejumlah tamu undangan dari berbagai instansi, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.

Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Alisyahbana mengatakan pemanfaatan lahan sempit itu merupakan bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat.

“Lahan terbatas bukan alasan untuk tidak produktif. Ini adalah komitmen Puspenerbal dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kami memilih melon hidroponik premium karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan saat ini sedang menjadi tren di masyarakat,” kata Bayu dalam sambutannya, Kamis (30/7/2026) (md/rus)

82 Siswa SDN Kupang 3 dan 4 Belum Terima MBG

Wabup Mimik
Janjikan Akhir Juli,
Pengelola SPPG
Terkendala Akses

SIDOARJO—Di tengah bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai sekolah, sebanyak 82 siswa SDN Kupang 3 dan SDN Kupang 4, Kecamatan Jabon, masih harus bersabar. Hingga kemarin (30/7), makanan bergizi yang sempat dijanjikan Wabup Mimik Idayana akan diberikan akhir bulan ini masih belum juga tiba di sekolah mereka.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN Kupang 4 Wahyu Indah Rakhmawati mengatakan, sebelumnya sekolah telah mendapat informasi bahwa MBG akan mulai disalurkan pada akhir Juli. Namun hingga saat ini, para siswa masih belum menerima makanan bergizi tersebut. Itu membuat mereka kecewa.

"Kami masih menunggu kepastian jadwal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dukuhsari," ujarnya. Menurut Wahyu, program MBG sangat dinantikan para siswa dan orang tua. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program itu juga diharapkan menambh semangat belajar.

"Kami berharap program segera terealisasi dan mendapatkan hak sama dengan sekolah lain," tambah Wahyu.



TUNGGU JATAH: Dua siswa SDN Kupang 4 membeli jajan dari kantin sekolah. Anak-anak di sekolah tersebut berharap segera mendapat MBG.

**MBG
UNTUK
SISWA
KOTA DELTA**

- Sasaran sekolah (SD-SMP): **769 lembaga**
- Belum menerima MBG: **308 sekolah**
- Penyebabnya karena kekurangan dapur MBG

Sumber:
Wawancara
Jawa Pos



Kami berharap program segera terealisasi dan mendapatkan hak sama dengan sekolah lain."

Wahyu Indah Rakhmawati
Pelaksana Tugas
Kepala SDN Kupang 4

Dia menjelaskan, anak-anak di SDN Kupang 4 rata-rata berasal dari orang tua yang pendapatannya masih rendah. Sehingga mereka berhak mendapatkan bantuan.

Kekurangan Ompreng

Kepala SPPG Dukuhsari Rajul Munawar menjelaskan, keterlambatan bukan disebabkan penghentian program, melainkan kendala teknis distribusi. Kondisi medan

menuju wilayah Kupang mengharuskan pengiriman dilakukan menggunakan sepeda motor sehingga membutuhkan penyesuaian armada dan perlengkapan.

"Bukan tidak mau, tetapi ompreng kami masih kurang dan perlu penambahan," katanya. Menurut dia, SPPG saat ini masih menambah armada sepeda motor, sekitar 150 ompreng, serta keranjang angkut untuk melayani lima sekolah tambahan di wilayah Kupang. Seluruh pengadaan masih diproses bersama mitra pengelola dapur.

Selain SDN Kupang 3 dan Kupang 4, ada 308 sekolah yang dikabarkan belum mendapat MBG hingga 20 Juli lalu.

Wabup Mimik Idayana mengaku akan mengecek persoalan tersebut. "Masa belum mendapat. Nanti saya cek ke SPPG," katanya singkat. (ful/hen)

JUMAT, 31 JULI 2026

gak iso turu
ECERAN: Rp 5.000

Satpol PP Sita Puluhan Botol Miras dari Warkop dan Tempat Hiburan

■ Razia di Beberapa Lokasi

KOTA-Satpol PP Sidoarjo menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekam) dengan menyasar sejumlah warung kopi (warkop) hingga tempat hiburan malam yang diduga menjual minuman keras (miras) secara ilegal, Rabu (29/7) malam. Dalam operasi yang melibatkan 62 personel tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan botol minuman keras dari sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Raden Novianto Koesno Adi Putro, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut atas komitmen pemerintah daerah dalam menekan peredaran miras yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Operasi ini merupakan bentuk penegakan peraturan daerah untuk menjaga ketertiban umum. Kami menyasar lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran minuman keras, baik warung kopi maupun



TEGAS: Satpol PP Sidoarjo sasar sejumlah warkop di GOR yang menjual minuman keras. Beberapa pedagang juga didata untuk pencegahan pelanggaran aturan, Rabu (29/7) malam.

tempat hiburan malam," ujar Novianto, Kamis (30/7).

Sebelum operasi dimulai, seluruh personel mengikuti apel kesiapan di Kantor Satpol PP

Kabupaten Sidoarjo. Dalam arahnya, Novianto menegaskan agar petugas melakukan pemeriksaan identitas terhadap pemilik usaha, pemandu lagu maupun pengunjung di lokasi sasaran.

Apabila ditemukan barang bukti berupa minuman keras, seluruhnya langsung diamankan untuk

proses lebih lanjut. "Kami juga melakukan pendataan terhadap pemilik usaha serta memberikan sosialisasi dan edukasi terkait aturan yang berlaku. Sementara barang bukti minuman keras kami amankan ke Mako Satpol PP sebagai bagian dari proses penindakan," katanya. (dik/vga)



CS Updata Berita Cerdas

RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Gelar Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025



SIDOARJO | |LENSA-GLOBAL.com - Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo digelar rapat paripurna dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/7/2026) malam. Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih didampingi Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Warih Andono dan H. Suyarno mengatakan berdasarkan laporan Sekretaris DPRD Sidoarjo, jumlah anggota Dewan yang hadir di ruang Rapat Paripurna dalam persidangan ini sebanyak 39 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) huruf b Tata Tertib DPRD Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Tata Tertib DPRD Sidoarjo, dan telah memenuhi kuorum rapat. Abah Nasih-sapaan akrabnya- menyampaikan pula bahwa berdasarkan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna sebelumnya, kami tawarkan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan sekalian: apakah Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui? Dijawab serentak "Setuju" oleh semua anggota dewan yang hadir. "Alhamdulillah Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan DPRD Sidoarjo, serta dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo", ujarnya. Selanjutnya, dalam sambutannya Bupati Sidoarjo, H. Subandi mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat atas kesediaannya menghadiri Rapat Paripurna hari ini. Menurut Subandi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah — mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, hingga pengawasan — sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, paparnya. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini telah melalui tahapan pembahasan secara lengkap — mulai dari penyampaian Nota Penjelasan, Pemandangan Umum Fraksi, Jawaban Pemerintah, hingga Pembahasan Badan Anggaran — hingga akhirnya sampai pada tahap Pengambilan Keputusan ini. Subandi juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota DPRD atas tanggapan, saran, masukan, dan pengawasan yang telah diberikan. Berkat kerja sama yang terjalin dengan baik, pengelolaan keuangan daerah kita dapat berjalan tertib. Dan alhamdulillah, kembali kami meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI — yang merupakan pencapaian ke-13 kalinya secara berturut-turut. "Semoga ke depannya kita terus saling melengkapi, saling mengisi, dan bekerja sama secara harmonis demi membangun Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai bersama. Mari kita tetap kompak, tetap bersemangat, dan terus bekerja sejalan menuju Sidoarjo yang semakin maju dan sejahtera", pungkasnya. Sebelum rapat paripurna usai, dilakukan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo terhadap Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna selain dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo dan H. Warih Andini dan H. Suyarno. Tampak hadir pula Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH., Setda Sidoarjo, Fenny Apridawari, serta Forkopimda kabupaten Sidoarjo.(rz)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Banggar DPRD Sidoarjo Soroti Kinerja APBD 2025, Pendapatan Lampau Target dan Defisit Berbalik Jadi Surplus



KaMedia – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (30/7), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo. Rapat dipimpin pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati Sidoarjo, jajaran Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam laporannya, Banggar memaparkan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Laporan tersebut menjadi pijakan penting bagi DPRD dalam menentukan persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ketua Banggar DPRD Sidoarjo menegaskan pembahasan dilakukan secara mendalam bersama seluruh mitra kerja. Efektivitas pelaksanaan program, tingkat penyerapan anggaran, serta kualitas pengelolaan keuangan menjadi sejumlah catatan strategis yang mendapat perhatian dalam pembahasan. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Afdhal Muhamad Insan, turut menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025. “Dari hasil audit BPK, kita melihat ada indikator pengelolaan keuangan yang sudah sesuai dengan ketentuan administrasi. Ini menjadi catatan positif, sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Afdhal di ruang paripurna. Afdhal mengungkapkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp5,5 triliun atau 101,3 persen dari target dalam APBD Perubahan 2025. Capaian tersebut melampaui target sebesar Rp73.411.126.700,54, menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang tetap terjaga. Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp5,464 triliun atau sekitar 90 persen dari total anggaran. Masih terdapat anggaran yang belum terserap sebesar Rp606.791.440.994,95 yang menjadi salah satu perhatian DPRD untuk dievaluasi pada pelaksanaan anggaran berikutnya. Salah satu capaian yang paling disorot dalam laporan Banggar adalah perubahan kondisi fiskal daerah. APBD 2025 yang setelah perubahan semula diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp618 miliar, pada akhir tahun justru membukukan surplus sebesar Rp61,7 miliar. Perubahan ini dinilai mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 tercatat sebesar Rp680,654 miliar atau sekitar 11,1 persen dari dana yang tersedia. Secara nominal, angka tersebut meningkat Rp37,378 miliar dibandingkan periode sebelumnya. Meski sejumlah indikator keuangan menunjukkan hasil yang positif, DPRD menegaskan bahwa seluruh rekomendasi BPK harus segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan memasuki tahapan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD berikutnya. Melalui penyampaian laporan ini, DPRD Kabupaten Sidoarjo berharap evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 menjadi pijakan untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.

